

Judul : Uji kompetensi nakes,tingkatkan mutu, kurangi hambatan
Tanggal : Sabtu, 22 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Uji Kompetensi Nakes Tingkatkan Mutu, Kurangi Hambatan



Neng Eem Marhamah Zulfa

ANGGOTA Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (nakes) di masa transisi. Uji kompetensi ini harus membantu mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan, bukan jadi hambatan baru.

Neng Eem menyebut, kebutuhan tenaga medis dan nakes nasional masih jauh dari terpenuhi. Baik dokter, perawat, bidan maupun nakes lainnya. Karena itu, meski mutu tetap harus dijaga karena menyangkut nyawa manusia, uji kompetensi jangan malah menjadi hambatan.

"Standar uji kompetensi jangan sampai terlampau rumit atau meniru standar negara lain yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia," ujar Neng Eem dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Dia mengusulkan agar penilaian uji kompetensi tidak hanya menggunakan skema lulus atau tidak lulus, tapi menerapkan penilaian berbasis tingkat atau grading. Dengan skema itu, seluruh peserta tetap dinyatakan lulus, tapi penugasan dan kewenangan klinis disesuaikan dengan tingkat kompetensi masing-masing.

"Grading lebih manusiawi. Mereka menempuh pendidikan bertahun-tahun, jangan sampai terhambat karena mekanisme uji kompetensi yang tidak adaptif," tegas legislator PKB itu.

Komisi IX, lanjutnya, meminta kementerian dan konsil memastikan pelaksanaan uji

kompetensi di masa transisi berjalan seragam dan memberi kepastian hukum. Dia mengingatkan soal pentingnya sosialisasi luas kepada perguruan tinggi dan kolegium agar tidak terjadi kebingungan.

Selanjutnya, kata dia, uji kompetensi harus meningkatkan standar kompetensi tenaga medis dan nakes melalui harmonisasi dengan standar internasional. Namun, dengan tidak mengabaikan kebutuhan nasional dan kedaulatan regulasi Indonesia.

Menurutnya, kerja kolaboratif antara Kemenkes, Kemen-diktisaintek, konsil, dan kolegium jadi hal krusial dalam proses ini. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis dan nakes. "Yang kita cari adalah solusi. Uji kompetensi harus menjadi alat pembinaan, bukan hambatan," ingatnya.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani menambahkan, uji kompetensi berguna untuk memastikan mutu layanan kesehatan dan kualitas lulusan pendidikan kesehatan. Pemerintah dan lembaga terkait diminta memaparkan data lengkap jumlah peserta uji kompetensi dari berbagai profesi tiap tahun, termasuk tingkat kelulusan.

Politikus PKS itu mengingatkan agar standar uji kompetensi tidak diturunkan hanya demi pemerataan tenaga kesehatan. Yang harus dikejar adalah peningkatan jumlah tenaga kesehatan melalui pemerataan distribusi, bukan melonggarkan standar kompetensi.

"Jangan sampai kita menurunkan standar kompetensi atas nama pemerataan. Yang harus ditingkatkan adalah pemerataan tenaga fisiknya," tegasnya.

Selanjutnya, kata dia, adalah soal petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan uji kompetensi. Juknis kudu segera dirampungkan, karena keterlambatan dalam penyusunannya bisa berdampak langsung pada kelulusan peserta. "Juknis harus segera selesai. Jangan sampai kelulusan tertunda karena juknis belum disusun," tegasnya. ■ PYB